



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/744/B.07/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANA PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Jabatan Manajerial dan Jabatan Pelaksana pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2024;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;

2. Surat Pengantar Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Nomor: 800/3491/VI.05/Sekrt/2024, tanggal 9 Oktober 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANA PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Menetapkan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Jabatan Manajerial dan Jabatan Pelaksana pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, menjadi pedoman untuk penataan dan penyempurnaan di bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas.

- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/572/B.07/HK/2022 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5// - 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pelayanan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektorat Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/744/B.07/HK/2024
TANGGAL: 11 - 11 - 2024

REKAPITULASI ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

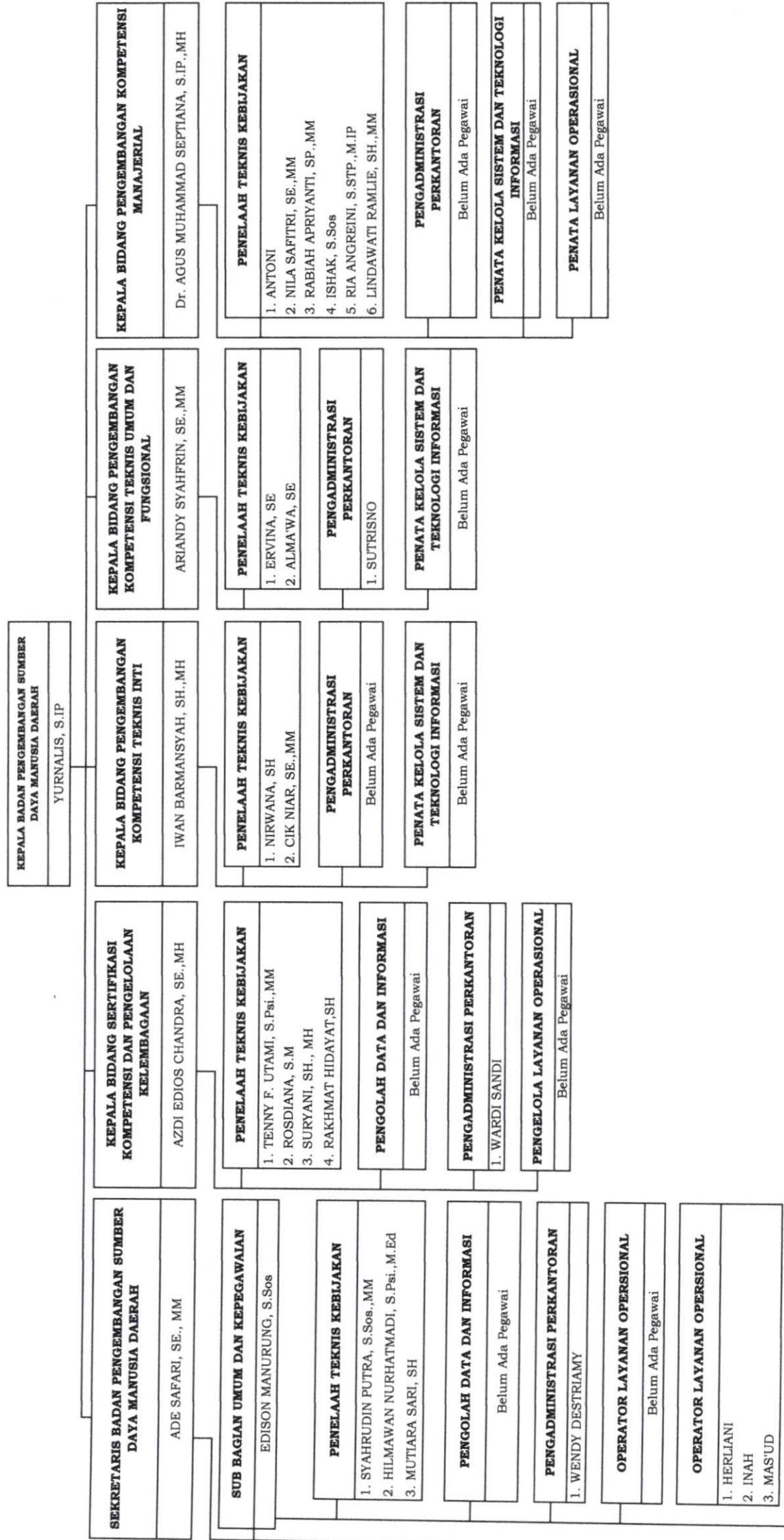
NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	NILAI BEBAN KERJA/EFEK TIFITAS JABATAN (EJ)	HASIL ABK	KELEBIHAN/KE KURANGAN	PJ	EFEKТИFИТАС UNIT (EU)	PU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	1	1,488	1	0	A		
2	SEKRETARIS	1	1,303	1	0	A	2,638	A
3	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	1	3,997	4	-3	A		
4	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	2,407	2	-2	A		
5	- PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	0	1,899	2	-2	A		
6	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	0,638	1	-1	D		
7	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAΙAN	1	1,176	1	0	A		
8	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	3	7,998	8	-5	A		
9	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	2,407	2	-2	A		
10	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	6,452	6	-5	A		
11	- OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	0	3,188	3	-3	A		
12	- OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	3	3,416	3	0	A		
13	- PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	0	1,6	2	-2	A		
14	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	0,84	1	-1	C		
15	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET	0	1,187	1	-1	A		
16	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	4	5,00	5	-1	A		
17	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	2,407	2	-2	A		
18	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	0	1,608	2	-2	A		
19	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	0,712	1	-1	C		
20	KEPALA BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN PENGELOLAAN KELEMBAGAAN	1	1,236	1	0	A	2,209	A
21	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	4	3,997	4	0	A		
22	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	2,407	2	-2	A		
23	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	1,608	2	-1	A		
24	- PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	0,824	1	-1	C		
25	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS INTI	1	1,184	1	0	A	2,668	A
26	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	2	3,970	4	-2	A		
27	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	0	1,608	2	-2	A		
28	- PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	0	2,398	2	-2	A		
29	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS UMUM DAN FUNGSIONAL	1	1,192	1	0	A	2,668	A
30	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	2	3,997	4	-2	A		
31	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	1,608	2	-1	A		
32	- PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	0	2,398	2	-2	A		
33	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL	1	1,243	1	0	A	2,91	A
34	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	6	6,996	7	-1	A		
35	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	0	1,608	2	-2	A		
36	- PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	0	2,398	2	-2	A		
37	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	0,638	1	-1	D		
	Jumlah	35	80,781	89	-54		2,619	A

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

2.1 PETA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PENYUSUNAN ANALIS JABATAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG



PENGELOLA UMUM OPERASIONAL
Belum Ada Pegawai
PENATA LAYANAN OPERASIONAL
Belum Ada Pegawai
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
Belum Ada Pegawai
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
1. SUPRAPTI, S.Sos,MM 2. FITRIA WANTETA, S.Kom.,MM 3. SUHARTINI, S.Sos 4. AGUS PURWANTO, S.Kom
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI
Belum Ada Pegawai
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
Belum Ada Pegawai
PENATA LAYANAN OPERASIONAL
Belum Ada Pegawai
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
1. JAMAL MUHAMMAD NASIR, SE, MM
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI
Belum Ada Pegawai
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
Belum Ada Pegawai
PENATA LAYANAN OPERASIONAL
Belum Ada Pegawai

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

**3.1 PETA JABATAN MANAJERILA DAN JABATAN HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

		Kls	B	K	S
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG		15	1	1	0
SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		12	1	1	0
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN		9	1	1	0
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN		7	4	4	0
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI		6	0	2	-2
PENELAAH DATA DAN INFORMASI		7	3	8	-5
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN		5	1	6	-5
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL		5	0	2	-2
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL		3	3	3	0
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL		1	0	2	-2
PENATA LAYANAN OPERASIONAL		7	0	1	-1
JUMLAH		35	89	-54	
		Kls	B	K	S
KEPALA BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN PENGELOLAAN		11	1	1	0
PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS INTI		11	1	1	0
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN		7	2	4	-2
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI		5	0	2	-2
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN		7	2	4	-2
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI		5	1	2	-1
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN		5	1	2	-1
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI		7	0	2	-2
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI		7	0	2	-2
PENATA LAYANAN OPERASIONAL		7	0	1	-1
		Kls	B	K	S
KEPALA JABATAN		1	1	0	0
KELAS 15		1	1	0	0
KELAS 12		1	1	0	0
KELAS 11		4	4	0	0
KELAS 9		1	2	-1	0
KELAS 7		22	48	-26	0
KELAS 6		0	9	-9	0
KELAS 5		3	19	-16	0
KELAS 3		3	3	0	0
KELAS 1		0	2	-2	0
JUMLAH		35	89	-54	
		Kls	B	K	S
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL		11	1	1	0
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN		7	6	7	-1
PENGADMINTRASI PERKANTORAN		5	0	2	-2
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI		7	0	2	-2
PENATA LAYANAN OPERASIONAL		7	0	1	-1

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET	Kls	B	K	S
PENELAAH TEKNIS KEBIAKAN	9	0	1	-1
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	7	4	5	-1
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	6	0	2	-2
PENATA LAYANAN OPERASIONAL	5	0	2	-2
PENELAAH TEKNIS KEBIAKAN	7	0	1	-1
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	7	1	4	-3
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	6	0	2	2
PENATA LAYANAN OPERASIONAL	7	0	2	-2

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,


SAM SUDIN